



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: PER- 031 /A/JA/11/2009  
T E N T A N G  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PEMBENTUKAN JAKSA (PPPJ) TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pegawai Kejaksaan terutama peningkatan mutu Jaksa agar memiliki kemampuan intelektual, professional, integritas kepribadian serta memiliki dedikasi yang tinggi, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun 2010;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun 2010 perlu menetapkan penyelenggaraan, program, dan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) ;
  - c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil ;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
  5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;
  6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tanggal 30 Maret 2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;
  7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-068/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
  8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2010 Nomor: SP. 0035.0/006-01.0/12/2009 tanggal 31 Desember 2009.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA (PPPJ) TAHUN 2010.

**PERTAMA** : Penyelenggaraan

**1. Bentuk**

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2010 diselenggarakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu nonklasikal dan klasikal;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2010 secara nonklasikal selanjutnya dinamakan PPPJ Pendahuluan;
- c. Penyelenggaraan PPPJ Tahun 2010 secara klasikal selanjutnya dinamakan PPPJ Lanjutan.

**2. Tempat**

- a. PPPJ Pendahuluan diselenggarakan di tempat kerja masing-masing peserta Diklat;
- b. PPPJ Lanjutan diselenggarakan di Pusat Diklat Kejaksaan RI;

**3. Waktu**

- a. PPPJ Pendahuluan diselenggarakan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 1 Juni 2010;
- b. PPPJ Lanjutan diselenggarakan selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juni sampai dengan 2 Oktober 2010.

**4. Peserta Diklat**

- a. Peserta Diklat adalah Para Pegawai Tata Usaha Kejaksaan yang berijazah Sarjana Hukum yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk mengikuti Diklat yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia;
- b. Jumlah peserta Diklat pendahuluan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) orang yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia;
- c. Jumlah peserta Diklat PPPJ lanjutan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) orang terbagi menjadi 9 (sembilan) kelas.

**5. Penyelenggara**

Penyelenggara Diklat adalah Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

**KEDUA** : Tujuan dan Sasaran

**A. Tujuan**

**a. Umum**

1. Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan sebagai Pegawai Kejaksaan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
2. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir serta wawasan yang komprehensif dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
3. Memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan secara profesional dengan dilandasi sikap dan kepribadian seorang Jaksa yang bersendikan Tri Krama Adhyaksa.

#### **b. Khusus**

1. Meningkatkan semangat pengabdian, penyerapan ilmu dan perkembangan, wawasan tugas dan lingkungan serta kemampuan operasional dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai Jaksa Fungsional;
2. Mempersiapkan Jaksa-Jaksa muda siap pakai dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia.

### **B. Sasaran**

#### **a. Umum**

1. Tersedianya Pegawai Kejaksaan yang memiliki kualitas tertentu guna memenuhi salah satu persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Jaksa Fungsional;
2. Tersedianya Jaksa Fungsional yang memiliki kemampuan dan keterampilan, memiliki integritas kepribadian dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan baik dalam penanganan perkara Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara maupun dibidang Pembinaan, Intelijen dan Pengawasan.

#### **b. Khusus**

1. Mempersiapkan tenaga Jaksa Fungsional yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menangani perkara pidana sejak tahap penyelidikan sampai eksekusi selaku Jaksa /Penuntut Umum dan sekaligus dalam menangani perkara perdata;
2. Mendidik melatih dan membentuk Pegawai Kejaksaan untuk menjadi Jaksa beretika, profesional, berkepribadian yang tangguh, tanggap, teruji dan mandiri (independen).

### **KETIGA : Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2010**

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Pendahuluan terdiri dari :
  - a. Perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka, jarak jauh, yang dilaksanakan secara mandiri, proaktif, dan berkelompok dengan modul pembelajaran;
  - b. Jurnal dan laporan Pelaksanaan Tugas;
  - c. Evaluasi (pretest, middle test dan evitest).
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Lanjutan terdiri dari :
  - a. Perkuliahan (diskusi, praktek dan bedah kasus);
  - b. Praktek Kerja Lapangan (PKL);
  - c. Simulasi Persidangan (pidana dan perdata);
  - d. Penulisan Kertas Kerja (makalah) tugas Jaksa tingkat dasar.

### **KEEMPAT : Kurikulum dan Tenaga Pengajar**

1. Jumlah jam pembelajaran PPPJ Tahun 2010 sebanyak 1320 JPL terdiri dari :
  - a. PPPJ Pendahuluan sebanyak 174 JPL;
  - b. PPPJ Lanjutan sebanyak 1.146 JPL ;
2. Kurikulum PPPJ Pendahuluan dan PPPJ Lanjutan tercantum dalam Lampiran I dan II;

**KURIKULUM DIKLAT PPPJ PENDAHULUAN TAHUN 2010  
(3 Bulan)**

| No | MATA KULIAH  | POKOK BAHASAN  | SUB POKOK BAHASAN  | METODE PEMBELAJARAN   | PENGAJAR / FASILITATOR   |
|----|--|--|--|---|--|
| 1  | KAJIAN DASAR HUKUM PIDANA<br>1. Asas-asas hukum pidana | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asas-asas umum Hukum Pidana</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Asas Lex specialis derogat legi generali                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Logis</li> <li>- Systimatis</li> </ul> </li> <li>➢ Asas Lex posterior derogat legi priori</li> <li>➢ Asas Lex superior derogat legi inferiori</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Belajar mandiri / Tatap muka / Pembimbingan</li> <li>➢ Evaluasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Widyaaiswara</li> <li>- Pejabat Struktural di daerah :</li> <li>➢ Asisten</li> <li>➢ Kajari</li> <li>➢ Para Kasi</li> </ul> |
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan luas berlakunya hukum pidana</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Asas Legalitas</li> <li>➢ Locus &amp; tempus Delicti</li> <li>➢ Asas Territorialitas</li> <li>➢ Asas Nasionalitas aktif</li> <li>➢ Asas Universalitas</li> </ul>  |   |  |
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tindak Pidana</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Istilah-istilah tindak pidana</li> <li>➢ Pengertian tindak Pidana</li> <li>➢ Jenis-Jenis Tindak Pidana</li> <li>➢ Subyek Tindak Pidana</li> <li>➢ Unsur-Unsur Tindak Pidana</li> </ul>  |   |  |
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sifat Melawan Hukum</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Istilah-istilah melawan hukum</li> <li>➢ Pengertian melawan hukum</li> <li>➢ Ajaran –ajaran sifat melawan hukum</li> <li>➢ Pembuktian Unsur melawan hukum dalam suatu delik</li> </ul>  |   |  |
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesalahan (schuld) dan pertanggungjawaban pidana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pengertian kesalahan (schuld)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian secara umum</li> <li>- Pengertian dalam hukum pidana</li> </ul> </li> <li>➢ Istilah dan pengertian kemampuan bertanggung jawab</li> </ul>   |   |  |
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesengajaan (Dolus)</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pengertian Kesengajaan (dolus)</li> <li>➢ Teori-teori kesengajaan</li> <li>➢ Bentuk-bentuk kesengajaan</li> <li>➢ Kesengajaan menurut doktrin</li> <li>➢ Kekeliruan (eror) pada kesengajaan :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Error in persona</li> <li>- Kekeliruan mengenai hukum</li> <li>- Kekeliruan mengenai fakta (Feitelijke Dwaling)</li> </ul> </li> </ul> |   |  |

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kealpaan (culpa)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pengertian Kealpaan (culpa)</li> <li>➢ Bentuk Kealpaan</li> <li>➢ Dari sudut keadaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Culpa Lata (berat)</li> <li>- Culpa levi's (ringan)</li> </ul> </li> <li>➢ Dari sudut kesadaran <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kealpaan yang tidak disadari</li> <li>- Kealpaan yang disadari</li> </ul> </li> <li>➢ Perbedaan kesengajaan dan kealpaan</li> </ul> |  |  |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesalahan di dalam delik pelanggaran</li> <li>Hubungan sebab akibat atau causaliteit, causalitet</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tujuan mempelajari sebab akibat dalam delik materil dan formil</li> <li>➢ Sebab akibat dalam delik omisi</li> <li>➢ Teori-teori kausalitas</li> <li>➢ Perumusan sebab akibat dalam undang-undang</li> <li>➢ Hubungan kausal antara sebab dan akibat</li> <li>➢ Sebab akibat dalam praktek hukum</li> </ul>   |  |  |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pidana dan pemidanaan (hukum Penitensier)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pengertian pidana dan pemidanaan</li> <li>➢ Sejarah pidana dan pemidanaan di Indonesia</li> <li>➢ Teori-teori pemidanaan</li> <li>➢ Jenis-jenis pidana menurut KUHP</li> <li>➢ Pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat</li> </ul>   |  |  |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Percobaan (poging, atempt)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pengertian dan sifat percobaan</li> <li>➢ Dasar patut dipidananya percobaan</li> <li>➢ Unsur-unsur percobaan</li> <li>➢ Percobaan mampu dan tidak mampu</li> <li>➢ Mangel am tatbestand</li> <li>➢ Pemidanaan terhadap percobaan</li> </ul>  |  |  |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyertaan (deelneming)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Beberapa istilah atau arti</li> <li>➢ Beberapa pandangan tentang sifat Penyertaan</li> <li>➢ Pembagian penyertaan</li> <li>➢ Penyertaan menurut KUHP Indonesia</li> <li>➢ Penyertaan dalam kealpaan</li> <li>➢ Perubahan penyertaan dalam penyertaan</li> </ul>  |  |  |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gabungan tindak pidana (samenloop / concursus)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Beberapa pandangan tentang concursus</li> <li>➢ Pengaturan concursus dalam KUHP</li> <li>➢ Pengertian concursus</li> <li>➢ Sistem pemberian pidana / stelsel pemidanaan</li> </ul>   |  |  |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alasan / hapusnya pidana</li> </ul>                                       | <p>Alasan penghapusan pidana :</p> <p>a. Alasan pemaaf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 44 (tak mampu bertanggungjawab)</li> <li>- Pasal 51 (2) melaksanakan perintah jabatan yang sah</li> </ul> <p>b. Alasan pembenar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overmacht (pasal 48 KUHP )</li> <li>- Keadaan darurat (noodtoestand)</li> <li>- Pembelaan darurat (noodweer) pasal 49 (1) KUHP</li> <li>- Pembelaan paksa (noodcause axces) pasal 49 (2)</li> <li>- Menjalankan perintah undang-undang pasal 50</li> <li>- Melaksanakan perintah jabatan pasal 51 (1)</li> </ul> |  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gugurnya kewenangan menuntut dan kewenangan menjalankan Pidana</li> </ul> | <p>Alasan gugurnya kewenangan jaksa menuntut menurut KUHP (Ps.76,77,78,79)</p> <p>Alasan diluar KUHP</p> <p>Alasan gugurnya kewenangan menjalankan Pidana (ps.83 dan Ps.84 KUHP)</p> <p>Alasan penundaan daluarsa (Ps.80 dan Ps.81 KUHP)</p> <p>Pengertian (recidive)</p> <p>Recidive menurut KUHP</p> <p>Recidive diluar KUHP</p>  |  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengulangan tindak pidana (recidive)</li> </ul>                           | <p>Dasar hukum</p> <p>Jenis delik aduan</p> <p>Perbedaan antara pengaduan dengan laporan</p> <p>Yang berhak mengajukan delik aduan</p> <p>Jangka waktu mengajukan aduan</p>   |  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Delik aduan (Klacht delict)</li> </ul>                                    |   |  |  |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
| <p><b>2. Delik-Delik Tertentu dalam KUHP</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kejahatan Terhadap Harta Benda</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belajar mandiri</li> <li>Tatap muka / pembimbingan</li> <li>Evaluasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Widyaiswara</li> <li>Pejabat Struktural di daerah :</li> <li>Asisten</li> <li>Kajari</li> <li>Para Kasi</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kejahatan Terhadap Harta Benda</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belajar mandiri</li> <li>Tatap muka / pembimbingan</li> <li>Evaluasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Widyaiswara</li> <li>Pejabat Struktural di daerah :</li> <li>Asisten</li> <li>Kajari</li> <li>Para Kasi</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kejahatan Terhadap Harta Benda</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belajar mandiri</li> <li>Tatap muka / pembimbingan</li> <li>Evaluasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Widyaiswara</li> <li>Pejabat Struktural di daerah :</li> <li>Asisten</li> <li>Kajari</li> <li>Para Kasi</li> </ul> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kejahatan Kesusilaan</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unsur-unsur Tindak Pidana dan Yurisprudensi tentang : <ul style="list-style-type: none"> <li>Kejahatan Kesusilaan di depan Umum ( Pasal 281, 282 KUHP )</li> <li>Perzinahan ( Pasal 284 KUHP )</li> <li>Perkosaan ( Pasal 285 KUHP )</li> <li>Perbuatan Cabul ( Pasal 289 KUHP )</li> </ul> </li> </ul>   |  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unsur-unsur Tindak Pidana dan Yurisprudensi tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyebar Kebencian ( Pasal 154, 155, 156, 156a, 157 KUHP )</li> <li>Penghasutan dan Penganjuran melakukan tindak pidana ( Pasal 160, 161, 163 KUHP )</li> <li>Pembiaran terhadap adanya permufakatan jahat ( Pasal 164, 165 KUHP )</li> <li>Memaksa masuk dalam rumah ( Pasal 167 KUHP )</li> <li>Turut serta dalam perkumpulan yang dilarang ( Pasal 169 KUHP )</li> <li>Kekerasan bersama-sama di depan umum ( Pasal 170 KUHP )</li> <li>Mengganggu Ketertiban Umum ( Pasal 172 KUHP )</li> <li>Merintangi / mengganggu rapat umum ( Pasal 173, 174, 175, 176, 177 KUHP )</li> <li>Kejahatan Terhadap Pemakaman ( Pasal 178, 179, 180, 181 KUHP )</li> <li>Perjudian ( Pasal 303, 303 bis KUHP )</li> <li>Perbuatan yang tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP)</li> </ul> </li> </ul> |  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penghinaan</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unsur-unsur Tindak Pidana dan Yurisprudensi tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penghinaan, Pencemaran ( Pasal 310 s/d 320 KUHP )</li> </ul> </li> </ul>  |  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kejahatan Yang Berkaitan dengan hal-hal yang palsu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unsur-unsur Tindak Pidana dan Yurisprudensi tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sumpah Palsu ( Pasal 242 KUHP )</li> <li>Lang Palsu ( Pasal 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252 KUHP )</li> <li>Pemalsuan Materai dan Merk ( Pasal 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262 KUHP )</li> <li>Pemalsuan Surat ( Pasal 263, 276 KUHP )</li> </ul> </li> </ul>  |  |  |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| <p><b>3. Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kedudukan, Pengertian &amp; Fungsi Hukum Acara Pidana.</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kedudukan hukum acara Pidana</li> <li>➢ Pengertian hukum acara pidana</li> <li>➢ Fungsi/tujuan hukum acara pidana</li> <li>- Fungsi pencegahan hukum</li> <li>- Tujuan mencari dan mendapatkan kebenaran materil</li> <li>- Melaksanakan putusan pengadilan</li> <li>- Tujuan melindungi Hak Asasi Manusia</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belajar mandiri</li> <li>• Tatap muka / pembimbingan</li> <li>• Evaluasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WidyaSwara</li> <li>• Pejabat Struktural di daerah :</li> <li>• Asisten</li> <li>• Kajari</li> <li>• Para Kasi</li> </ul> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejarah singkat dan ruang lingkup hukum acara pidana Indonesia.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sejarah singkat hukum acara pidana Indonesia</li> <li>➢ Sejarah singkat hukum acara pidana Indonesia (KUHAP).</li> <li>➢ Ruang lingkup Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHAP).</li> <li>➢ Asas Praduga Tak Bersalah</li> <li>➢ Perlakuan yang sama dari setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan</li> <li>➢ Peradilan yang bebas, sederhana, cepat dan biaya ringan</li> <li>➢ Peradilan yang terbuka untuk umum</li> <li>➢ Ganti rugi dan rehabilitasi</li> <li>➢ Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasar perintah tertulis.</li> </ul>  |  |  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asas Hukum Acara Pidana</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Hak Tersangka (di tingkat penyidikan)</li> <li>- Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik</li> <li>- Pemeriksaan baru dimulai setelah tersangka diberitahu perbuatan yang disangkakan</li> <li>- Tersangka memberikan keterangan / jawaban secara bebas</li> <li>- Mendapat bantuan hukum dari seorang / lebih penasehat hukum</li> <li>- Tersangka yang ditahan berhak mengajukan saksi Ad Charge dan atau ahli</li> <li>- Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian</li> <li>- Minta ganti kerugian / rehabilitasi</li> <li>- Memperoleh turunan berita acara pemeriksaan</li> <li>➢ Hak Tersangka di Tingkat Pemeriksaan Pengadilan</li> <li>- Segera perkaraanya diajukan dan diadili dimuka pengadilan</li> <li>- Harus mengerti dakwaan sebelum pemeriksaan</li> </ul> |  |  |

|  |                                   |  |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|--|
|  |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memulai</li> <li>- Memberikan keterangan di pengadilan secara bebas</li> <li>- Diadili disidang pengadilan terbuka untuk umum</li> <li>- Mengajukan saksi dan hali yang menguntungkan</li> <li>- Mengajukan pertanyaan kepada saksi</li> <li>- Mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum</li> <li>- Menolak hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, panitera dan saksi (yang ada hubungannya dengan perkara tersebut)</li> <li>- Menentukan sikap terhadap putusan pemidanaan yang dijatkan pengadilan</li> </ul> |  |  |
|  | <b>Tahapan hukum acara pidana</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Hak Penasehat Hukum</li> <li>- Mendampingi tersangka dan terdakwa</li> <li>- Mengirim dan menerima surat dari tersangka dan terdakwa</li> <li>- Mengajukan penagguhan / pengalihan penahanan bagi tersangka atau terdakwa</li> <li>- Mengajukan alat bukti guna melumpuhkan pembuktian penyidik / penuntut umum</li> <li>- Mendampingi tersangka / terdakwa disemua tingkat pemeriksaan</li> <li>- Mengajukan pembelaan dan duplik</li> <li>➢ Mengajukan upaya hukum</li> </ul>   |  |  |
|  |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pengertian penyelidikan</li> <li>➢ Wewenang penyelidikan</li> </ul>   |  |  |
|  |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ <b>Penyelidikan</b></li> <li>➢ Pengertian penyelidikan</li> <li>➢ Pengertian macam-macam penyelidikan</li> <li>➢ Wewenang masing-masing penyelidikan</li> <li>➢ Hubungan antar aparat penegak hukum</li> <li>➢ Penghentian penyelidikan</li> </ul>  |  |  |
|  |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pengertian pra penuntutan</li> <li>➢ Tata cara pra penuntutan</li> </ul>  |  |  |
|  |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pengertian penuntutan</li> <li>➢ Wewenang penuntut umum</li> <li>➢ Surat dakwaan</li> </ul>   |  |  |

|  |  |   |   |  |  |
|--|--|---|---|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya paksa</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penangkapan</li> <li>➤ Penahanan</li> <li>➤ Pengeledahan</li> <li>➤ Penyitaan</li> </ul>   |  |  |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pemeriksaan saksi</li> <li>➤ Pemeriksaan ahli</li> <li>➤ Pemeriksaan terdangka</li> </ul>  |  |  |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pra peradilan</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengertian pra peradilan</li> <li>➤ Obyek pra peradilan</li> <li>➤ Subyek pra peradilan</li> <li>➤ Acara pemeriksaan pra peradilan</li> <li>➤ Putusan pra peradilan</li> <li>➤ Gugurnya permintaan pra peradilan</li> </ul>  |  |  |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ganti kerugian dan rehabilitasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ganti kerugian <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian ganti kerugian</li> <li>- Pemeriksaan tuntutan ganti kerugian</li> <li>- Bentuk putusan</li> <li>- Daluara tuntutan ganti kerugian</li> <li>- Jumlah besarnya ganti kerugian</li> </ul> </li> <li>➤ Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata cara pemeriksaan</li> <li>- Pelaksanaan putusan</li> </ul> </li> <li>➤ Rehabilitasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian</li> <li>- Batas waktu pengajuan rehabilitasi</li> <li>- Tata cara pemeriksaan</li> </ul> </li> </ul> |  |  |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koneksitas</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengertian koneksitas</li> <li>➤ Penyidikan perkara koneksitas</li> <li>➤ Wewenang pengadilan perkara koneksitas</li> <li>➤ Penuntutan perkara koneksitas</li> <li>➤ Pemeriksaan di pengadilan perkara koneksitas</li> <li>➤ Pra peradilan koneksitas</li> </ul>   |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuktian dalam proses peradilan pidana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pembuktian <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian pembuktian</li> <li>- Ruang lingkup pembuktian</li> <li>- Sistem pembuktian</li> <li>- Teori / sistem pembuktian</li> <li>- Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia</li> <li>- Prinsip minimum pembuktian</li> <li>- Pembuktian meliputi semua tingkat pemeriksaan</li> </ul> </li> </ul> |  |  |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat bukti dan Barang bukti</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Alat bukti</li> <li>➤ Barang bukti</li> <li>➤ Kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti</li> </ul>   |  |  |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya Hukum</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Upaya hukum biasa : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlawanan</li> <li>b. Banding</li> <li>c. Kasasi</li> </ul> </li> <li>➤ Upaya hukum luar biasa <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kasasi demi kepentingan hukum</li> <li>b. Peninjauan Kembali</li> </ul> </li> </ul>   |  |  |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pidana badan</li> <li>➤ Denda dan biaya perkara</li> <li>➤ Barang bukti</li> </ul>  |  |  |

II. KAJIAN DASAR TUGAS DAN FUNGSI INTELIJEN

| NO. | JUDUL MODUL                      | POKOK BAHASAN                | SUB POKOK BAHASAN  | METODE PEMBELAJARAN   | PENGAJAR  |
|-----|----------------------------------|------------------------------|--|---|---|
| 1.  | Pengertian Dan Anatomi Intelijen | Pengertian Intelijen         | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Arti Kata Intelijen</li> <li>b. Arti Pentingnya Intelijen</li> <li>c. Hakekat Intelijen</li> <li>d. Intelijen sebagai pisau analisis</li> <li>e. Kemampuan Intelijen</li> <li>f. Pendekatan Intelijen</li> <li>g. Tingkat urgensi Intelijen</li> <li>h. Pengertian Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Belajar mandiri /</li> <li>&gt; Tatap muka /</li> <li>Pembimbingan</li> <li>Evaluasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Widyaaiswara</li> <li>• Pejabat Struktural daerah :</li> <li>• Asisten</li> <li>• Kajari</li> <li>• Para Kasi</li> </ul> |
|     |                                  | Anatomi Intelijen            | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Latar Belakang</li> <li>b. Pengertian Anatomi Intelijen Organisasi</li> <li>c. Pengertian Anatomi Intelijen Sebagai Kegiatan dan operasi</li> <li>d. Pengertian Anatomi Intelijen Sebagai Produk</li> </ul>  |   |   |
| 2.  | Organisasi Intelijen             | Intelijen Sebagai Organisasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian Organisasi</li> <li>b. Intelijen Sebagai Badan / Alat Untuk Mencapai Tujuan</li> <li>c. Dasar-dasar Organisasi Intelijen</li> <li>d. Bentuk-bentuk Organisasi Intelijen</li> </ul>  |   |   |
|     |                                  | Pengorganisasian             | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Umum</li> <li>b. Penyusunan Organisasi Intelijen</li> <li>a. Sejarah dan Perkembangan Organisasi Kejaksaan</li> <li>b. Visi dan Misi Intelijen Kejaksaan</li> <li>c. Doktrin Intelijen Kejaksaan</li> <li>d. Tugas dan Fungsi Intelijen Kejaksaan</li> <li>e. Struktur Organisasi Intelijen Kejaksaan</li> </ul>                   |   |   |
|     |                                  | Organisasi Kejaksaan         | Intelijen  |   |   |

|  |                         |           |   |  |  |
|--|-------------------------|-----------|---|--|--|
|  | Intelijen (Kejaksanaan) | Yustisial | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian Intelijen Yustisial</li> <li>b. Hakekat Intelijen Yustisial</li> <li>c. Peranan Intelijen Yustisial Dalam Tugas Pokok Kejaksanaan</li> <li>d. Peranan Intelijen Yustisial Dalam Tugas-tugas Lain</li> <li>e. Fungsi-fungsi Intelijen Yustisial</li> <li>f. Penyelenggaraan Fungsi Intelijen Yustisial</li> </ul> |  |  |
|--|-------------------------|-----------|---|--|--|

**III. KAJIAN DASAR TUGAS DAN FUNGSI SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA**

| NO. | JUDUL MODUL             | POKOK BAHASAN                        | SUB BAHASAN  | METODE PEMBELAJARAN  | PENGAJAR   |
|-----|-------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 1   | 2                       | 3                                    | 4  | 5  | 6  |
| 1   | Asas-asas Hukum Perdata | 1. Asas-Asas Hukum Perdata           | Pengertian/ definisi<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Azas Monogami</li> <li>- Azas Konkordansi</li> <li>- Azas Recht Fictie</li> <li>- Azas Harta Kekayaan Debitur</li> <li>- Azas kehilangan segala hak perdata</li> <li>- Azas kebebasan berkontrak</li> <li>- Azas lex specialis derogat leg generalis</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belajar mandiri</li> <li>- Tatap muka/pembimbingan</li> <li>- Evaluasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Widyaaiswara</li> <li>• Pejabat Struktural di daerah :</li> <li>• Asisten</li> <li>• Kajari</li> <li>• Para Kasi</li> </ul> |
|     |                         | 2. Pengertian Hukum Perdata          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hukum Perdata dalam arti luas</li> <li>- Hukum Perdata dalam arti sempit</li> <li>- Usaha-usaha Pemerintah mem-bentuk Hukum Perdata Nasional</li> </ul>   |  |  |
|     |                         | 3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistematis menurut pembentuk</li> <li>- Undang-undang</li> <li>- Sistematis menurut Ilmu Pengetahuan</li> </ul>   |  |  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 2 | <b>Tugas dan Wewenang</b><br><br><b>JAM DATUN</b>                    | - Tugas dan Wewenang<br>Kejaksaan di Bidang Datun  | a. Penegakan Hukum<br>b. Bantuan Hukum diajukan oleh Instansi Pemerintah/BUMN/ BUMD atau Lembaga Negara<br>c. Permohonan untuk memperoleh pelayanan hukum diajukan di-<br>minta oleh masyarakat<br>d. Pertimbangan hukum<br>e. Tindakan hukum lain | - Belajar mandiri<br>- Tatap muka/pembimbingan<br>- Evaluasi<br><br>- Widyaaiswara<br>- Asdatun / Kasi- kasi dalam lingkup Asdatun |
|   | <b>Sejarah lahirnya tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Datun</b> | 1. Sebelum Staablad 1992 No.522<br>2. Staablad 1922 No.522<br>3. UU No. 15 Tahun 1961<br>4. KEPPRES No. 86 Tahun 1982<br>5. UU No. 5 Tahun 1991, Psi 27 ayat (2)<br>6. KEPPRES No. 55 Tahun 1991 pasal 24<br>7. KEPJA No. :KEP_035/JA/1992<br>8. KEPPRES No. 86 Tahun 1991<br>9. KEPJA No. : 115/JA/10/1999<br>10. KEPJA No. "225/JA /2003<br>11. UU No. 15 Tahun 2004<br>12. UU No.:40 Tahun 2007<br>13. UU No.37 Tahun 2004<br>14. UU No.31 Tahun 1999 | - Belajar mandiri<br>- Tatap muka/pembimbingan<br>- Evaluasi   |  |
|   | <b>Struktur Organisasi</b>   | a. Sekretariat<br>b. Direktorat Perdata (Dir DA)<br>c. Direktorat Tata Usaha Negara(Dir TUN)<br>d. Direktorat Pemulihan dan Perlindungan hak (DIR PPH)   |  |  |

|    |                           |  |  |  |  |
|----|---------------------------|--|--|--|--|
|    |                           | III. Mekanisme pelaksanaan tugas dan - fungsi JAM DATUN      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penegakan Hukum (Insja 001/JA/12/1994)</li> <li>b. Bantuan Hukum (Insja 002/JA/12/1994)</li> <li>c. pelayanan hukum, Pertimbangan hukum dan Tindakan hukum lain (Insja 003/JA/12/1994)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belajar mandiri</li> <li>- Tatap muka/pembimbingan</li> <li>- Evaluasi</li> </ul> |  |
| 3. | Hukum Administrasi Negara | I. Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam Ilmu Hukum      | Pengertian   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belajar mandiri</li> <li>- Tatap muka/pembimbingan</li> <li>- Evaluasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Widyaaiswara</li> <li>- Pejabat Fungsional</li> </ul> |
|    |                           | II. Sumber Hukum, Materi dan Objek Hukum Administrasi Negara | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber Hukum Administrasi Negara <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hukum Tertulis</li> <li>- Hukum Tidak Tertulis</li> </ul> </li> <li>b. Materi Hukum Administrasi Negara</li> <li>c. Objek Hukum Administrasi Negara</li> </ul>   |  |  |
|    |                           | III. Sumber wewenang dan perbuatan Administrasi Negara       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a. Sumber Wewenang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atribusi</li> <li>- Delegasi</li> <li>- Mandat</li> </ul> </li> <li><b>b. Perbuatan Administrasi Negara</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbuatan Hukum bukan hukum</li> <li>- Perbuatan Yuridis</li> </ul> </li> <li><b>c. Ketetapan Administrasi Negara/TUN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketetapan sbg tindakan pemerintah</li> <li>2. Ketetapan sebagai tindakan hukum</li> <li>3. Ketetapan sebagai tindakan alat perlengkapan negara</li> <li>4. Ketetapan sebagai tindakan dalam bidang hukum publik</li> <li>5. Ketetapan sebagai tindakan se-pihak.</li> </ul> </li> </ul> |  |  |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>d. <b>Macam-macam Ketetapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketetapan Positif</li> <li>2. Ketetapan Negatif</li> <li>3. Ketetapan Konstitutif</li> <li>4. Ketetapan Declaratoir</li> <li>5. Ketetapan yang menguntungkan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispensasi</li> <li>- Izin</li> <li>- Lisensi</li> <li>- Konsensi</li> </ul> </li> <li>6. Ketetapan yang tidak menguntungkan</li> <li>7. Ketetapan yang tetap</li> <li>8. Ketetapan sepintas lalu.</li> </ol> <p>a. Pengertian Freies-Ermessen<br/>b. Tolak Ukur Penggunaan FreiesErmessen</p> |  |
|--|--|--|---|--|

**IV. KAJIAN DASAR TINDAK PIDANA KHUSUS**

| NO. | JUDUL MODUL          | POKOK BAHASAN             | SUB BAHASAN   | METODE PEMBELAJARAN   | PENGAJAR   |
|-----|----------------------|---------------------------|---|---|--|
| 1   | 2                    | 3                         | 4   | 5   | 6  |
| 1   | Pengantar Tp Korupsi | 1. Tindak Pidana Korupsi  | <p>- Pengertian/ definisi</p> <p>- Penyebab Korupsi</p> <p>- Subyek Hukum TP Korupsi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang Siapa</li> <li>b. Pegawai Negeri</li> <li>c. Penyelenggara Negara</li> <li>d. Korporasi</li> </ol> <p>- Jenis-jenis TP Korupsi dan unsur-unsurnya :</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Belajar mandiri /</li> <li>➢ Tatap muka /</li> <li>➢ Pembimbingan</li> <li>➢ Evaluasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Widyaaiswara</li> <li>• Pejabat Struktural di daerah :</li> <li>• Asisten</li> <li>• Kajari</li> <li>• Para Kasi</li> </ul> |
|     |                      | 2. Delik-Delik TP Korupsi |   |   |  |

|   |                               |   |   |  |  |
|---|-------------------------------|---|---|--|--|
|   |                               |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- TP yang terkait dengan kerugian keuangan Negara (Pasal 2, 3)</li> <li>- TP yang terkait dengan suap menyuap (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, d)</li> <li>- TP yang terkait dengan pengelapan jabatan (Pasal 8, 9, 10 huruf a, b, c)</li> <li>- TP yang terkait dengan pembuatan pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, g)</li> <li>- TP yang terkait dengan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h)</li> <li>- TP yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i)</li> <li>- TP yang terkait dengan TP Korupsi Pasal 21, 22, 23, 2</li> <li>- Tindak Pidana Gratifikasi dan system pembuktiannya (Pembuktian terbalik)</li> <li>- Pemberlakuan Undang-undang.</li> </ul> |  |  |
| 2 | Perundang-Undangan Tp Korupsi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejarah TP Korupsi</li> <li>2. Peraturan Perundang-undangan TP Korupsi</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejarah peraturan TP Korupsi</li> <li>- Konvensi Internasional mengenai pemberantasan TP Korupsi</li> <li>- Kekhususan UU TP Korupsi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kekhususan dari sudut Hk Pid Materil</li> <li>b. Kekhususan dari sudut Hk Pid Formil</li> </ol> </li> </ul>   |  |  |

V. KAJIAN ADMINISTRASI KEJAKSAAN

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| <p>a) ADMINISTRASI PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• KEPJA-518/A/JA/11/2001</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian Administrasi perkara Tindak Pidana Khusus (PIDSUS).</li> <li>- Bentuk, jenis dan kode :               <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Surat (P)</li> <li>ii. Register (R)</li> <li>iii. Laporan (L)</li> </ol> </li> <li>- Mekanisme / proses pengadministrasian perkara tindak pidana khusus.</li> <li>- Administrasi perkara pidana khusus</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belajar mandiri</li> <li>• Tatap muka / pembimbingan</li> <li>• Evaluasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspidus</li> <li>- Kajari</li> <li>- Para Kasi</li> <li>Dibidang Pidsus</li> </ul> |
| <p>b) ADMINISTRASI PERKARA TINDAK PIDANA UMUM</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- KEPJA- 518/A/JA/11/2001</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian Administrasi perkara Tindak Pidana Umum (PIDUM).</li> <li>- Bentuk, jenis dan kode :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat (P)</li> <li>b. Register (R)</li> <li>c. Laporan (L)</li> </ol> </li> <li>- Mekanisme / proses pengadministrasian perkara tindak pidana umum.</li> <li>- Administrasi perkara pidana umum berdasarkan prinsip kesetaraan (SEJA-001/A/JA/02/2009, tanggal 26-02-2009).</li> <li>- Pengertian Administrasi Intelijen</li> <li>- Bentuk, jenis dan kode :               <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Surat (IN)</li> <li>ii. Register (R-IN)</li> <li>iii. Laporan (L-IN)</li> </ol> </li> <li>- Bentuk, jenis dan kode :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartutik</li> <li>b. Peta</li> </ol> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belajar mandiri</li> <li>• Tatap muka / pembimbingan</li> <li>• Evaluasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspidum</li> <li>- Kajari</li> <li>- Para Kasi dibidang Pidum</li> </ul>           |
| <p>c) ADMINISTRASI INTELIJEN</p>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• KEPJA- 552/A/JA/10/2002</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian Administrasi Intelijen</li> <li>- Bentuk, jenis dan kode :               <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Surat (IN)</li> <li>ii. Register (R-IN)</li> <li>iii. Laporan (L-IN)</li> </ol> </li> <li>- Bentuk, jenis dan kode :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartutik</li> <li>b. Peta</li> </ol> </li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belajar mandiri</li> <li>• Tatap muka / pembimbingan</li> <li>• Evaluasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asintel</li> <li>- Kajari</li> <li>- Para Kasie</li> <li>dibidang Intel</li> </ul> |
|   | <p>INTELIJEN SEBAGAI KEGIATAN DAN PRODUK</p>                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Umum</li> <li>b. Kode, Register dan Laporan</li> <li>c. Penyelenggaraan dan Pengolahan serta Pengawasan Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan RI</li> <li>d. Penyusunan Dokumen / File</li> <li>e. Pembuatan, Penyimpanan dan Penyusunan Kartutik</li> <li>f. Penyimpanan, Pengamanan Dan Pemusnahan Surat dan Dokumen</li> </ol>  |  | <p>s.d.a.</p>   |

|    |  | PRODUK INTELIJEN   |   | s.d.a.   |
|----|--|--|---|--|
|    |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Umum</li> <li>b. Bentuk Produk Intelijen</li> <li>c. Sistematika Produk Intelijen</li> <li>d. Penyajian Produk Intelijen</li> </ul>   |  |
| d) | Administrasi Perdata dan Tata Usaha Negara | -KEPJA-148/A/JA/12/1994  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bentuk, Jenis dan Kode :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat (S)</li> <li>b. Register (R)</li> <li>c. Laporan (L)</li> </ul> </li> <li>- INSJA No.INS-001/6/9/1991 TENTANG Mekanisme dan Tata Cara Penegakan Hukum.</li> <li>- INSJA No.INS-002/6/9/1991 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum</li> <li>-INSJA No. INS-003/6/9/1991 tentang Mekanisme dan tata cara Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lain.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asdatun</li> <li>- Kajari</li> <li>- Para Kasie dibidang Datun</li> </ul>           |
| e) | Administrasi Pengawasan                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• KEPJA-069/A/JA/07/2007</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- JUKLAK JAMWAS nomor : 01/H/HJW/07/2008 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan R.l.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belajar mandiri</li> <li>• Tatap muka / pembimbingan</li> <li>• Evaluasi</li> </ul> |
|    |  |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aswas</li> <li>- Para Pemeriksa dibidang Was</li> </ul>                             |


  
 10/11/09.

HENDARMAN SUPANDJI

# ALOKASI WAKTU DIKLAT PPPJ PENDAHULUAN TAHUN 2010

## 3 BULAN = 12 MINGGU

### PEMBUKAAN/PEMBELAJARAN

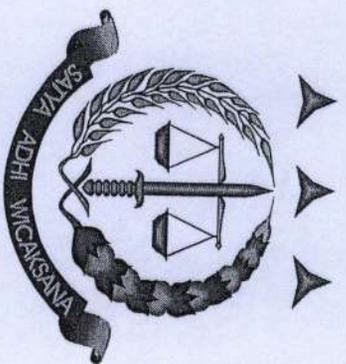
- a. Pembukaan : 5 Hari
- : 3 JPPL
- b. Pembekalan Administrasi Kejaksaan : 3 JPPL
- c. Pembelajaran Tatap Muka/Diskusi : 54JPPL
- Hukum Pidana : 30 JPPL
- Tugas dan Wewenang Jandatun : 10 JPPL
- Intelijen Pidsus : 14 JPPL

### PEMBELAJARAN JARAK JAUH

- a. Kajian Dasar Hukum Pidana dan administrasi Perkara : 10 Minggu
- : 4 Minggu
- b. Datun/Administrasi Datun : 2 Minggu
- c. Fungsi Intelijen dan Adm. Intelijen : 1 Minggu
- d. Administrasi Pengawasan : 1 Minggu
- e. Evaluasi Jarak Jauh : 2 Minggu

### EVALUASI AKHIR

- a. Evaluasi Hukum Pidana (Hari Pertama) : 27 JPPL (3 Hari)
- : 9 JPPL
- b. Evaluasi Pidsus (Hari Kedua) : 6 JPPL
- c. Evaluasi Intelijen (Hari Kedua) : 6 JPPL
- d. Evaluasi Datun (Hari Ketiga) : 6 JPPL



# KONSEP KURIKULUM PPPJ TAHUN 2010

**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JAKSA LANJUTAN**  
**TAHUN 2010 = 1146 JPL @ 45 MENIT (4 BULAN)**

| NO.           | MATA DIKLAT   | SILABUS/ POKOK BAHASAN   | WIDYAISWARA/PENGAJAR/<br>FASILITATOR  | RINCIAN JAM PELAJARAN |             |              |             |              | ASISTEN<br>PENGAJAR   |
|---------------|---|--|---|-----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---|
|               |   |  |   | TEORI                 | DISKUSI     | PRAK<br>TEK  | UJIAN       | JUM<br>LAH   |   |
| 1             | 2   | 3  | 4   | 5                     | 6           | 7            | 8           | 9            | 10  |
| 1.            | <b>KAJIAN SIKAP MENTAL DAN PERILAKU SERTA FISIK</b>               |  |   |                       |             |              |             |              |   |
|               | 1. <i>Moral dan Disiplin</i>                                      | - Sosialisasi Tatib dan Disiplin   | Kapusdiklat, Kabid. DTF   | 9                     | -           | -            | -           | 9            |   |
|               | 2. PBB dan TUM  | - Gerakan Baris Berbaris<br>- Tata Cara Penghormatan<br>- Tata Upacara Kedinasan<br>- Aplikasi awal PBB<br>- Aplikasi akhir PBB  | Tim PASKHAS TNI AU dan Matgakin<br><br>Penyelenggara dan Matgakin<br>Penyelenggara dan Matgakin | 9<br><br>3<br>3       | -<br>-<br>- | 33<br>6<br>6 | 3<br>-<br>- | 45<br>9<br>9 |   |
|               | 3. <i>Pembinaan Etika dan Perilaku Jaksa</i>                      | - KEPJA No: KEP-030/1988 tentang Doktrin Kejaksaan Republik Indonesia;<br>- PERJA-067/2007 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa;<br>- Membangun Jiwa dan Perilaku Jaksa.   |   | 6                     | 3           | -            | 3           | 12           | -Pitoyo Sasmo<br>-Sugondo<br>-Soeroyo<br>-Winarno<br>-R. Wiyono |
|               | 4. <i>Agama dan Budi Pekerti</i>                                  | Aktualisasi Keyakinan dan Norma Hukum Agama Dalam Profesi Jaksa  | DEPAG.  | 6                     | 3           | -            | 3           | 12           |   |
|               | 5. <i>Emotional and Spiritual Question (ESQ)</i>                  | - Berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa   | (Tim ESQ dan Penyelenggara)   | -                     | -           | -            | -           | -            | Paket 1 hari  |
|               | 6. <i>Kepeimpinan di alam terbuka/ out word bound (out bound)</i> | - Mengenal diri sendiri;<br>- Mengenal orang lain;<br>- Mengenal lingkungan;<br>- Nilai-nilai kejuangan dan kepemimpinan dalam lintas budaya;<br>- Keterbukaan, Partisipasi dan Demokrasi;<br>- Membangun organisasi belajar<br>- Berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa | Paket<br>(Tim Out Bound & Penyelenggara)  | -                     | -           | -            | -           | -            | 2 hari<br>(Sabtu, Minggu)                                       |
| <b>Jumlah</b> |   |  |   | <b>36</b>             | <b>6</b>    | <b>45</b>    | <b>9</b>    | <b>96</b>    |   |

| NO.    | MATA DIKLAT   | SILABUS/ POKOK BAHASAN | WIDYAISWARA/PENGAJAR/<br>FASILITATOR | RINCIAN JAM PELAJARAN   |  |  |  |  | ASISTEN<br>PENGAJAR                            |  |
|--------|---|------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
|        |   |                        |                                      | TEORI   | DISKUSI  | PRAK<br>TEK                                    | UJIAN  | JUM<br>LAH                                     |  |  |
| 1      | 2   | 3                      | 4                                    | 5   | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   |  |
| II.    | KAJIAN WAWASAN DALAM PELAKSANAAN TUPOKSI JAKSA  |                        |                                      |   |  |  |  |  |  |  |
|        | - CERAMAH INTERNAL:   |                        |                                      |   |  |  |  |  |  |  |
|        | 1. CERAMAH JA RI<br>2. CERAMAH WAKIL JA<br>3. CERAMAH JAM BIN<br>4. CERAMAH JAM INTEL<br>5. CERAMAH JAM PIDUM<br>6. CERAMAH JAM PIDSUS<br>7. CERAMAH JAM DATUN<br>8. CERAMAH JAM WAS<br>9. CERAMAH KAPUSDIKLAT<br>10. CERAMAH PJI |                        |                                      | JAKSA AGUNG RI<br>WAKIL JAKSA AGUNG RI<br>JAM BIN<br>JAM INTEL<br>JAM PIDUM<br>JAM PIDSUS<br>JAM DATUN<br>JAM WAS<br>KAPUSDIKLAT<br>PJI   | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3 |  |
|        | -CERAMAH EKSTERNAL:   |                        |                                      |   |  |  |  |  |  |  |
|        | 1. Ceramah Mahkamah Agung<br>2. Ceramah Kapoli<br>3. Ceramah BPKP<br>4. Ceramah PPATK<br>5. Ceramah BIN<br>6. Ceramah Komisi Kejaksaan<br>7. Ceramah Kertas Kerja<br>8. Ceramah Bimbingan Teknis PKL                              |                        |                                      | Mahkamah Mahkamah Agung<br>Kapoli<br>BPKP<br>PPATK<br>BIN<br>Komisi Kejaksaan<br>Kapusdiklat dan Kabid. DTF<br>Kapusdiklat dan Kabid. DTF | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-           | 3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3           | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-           | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-           | 3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3           |  |
| Jumlah |   |                        |                                      | -   | 54   | -  | -  | 54   |  |  |

| NO.  | MATA DIKLAT                       | SILABUS/ POKOK BAHASAN  | WIDYAISWARA/PENGAJAR/<br>FASILITATOR | RINCIAN JAM PELAJARAN |             |             |             |                | ASISTEN<br>PENGAJAR |
|------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|
|      |                                   |   |                                      | TEORI                 | DISKUSI     | PRAK<br>TEK | UJIAN       | JUM<br>LAH     |                     |
| 1    | 2                                 | 3   | 4                                    | 5                     | 6           | 7           | 8           | 9              | 10                  |
| III. | KAJIAN TUPOKSI INTELIJEN          |   |                                      |                       |             |             |             |                |                     |
|      | Tugas dan Fungsi Intelijen        | Roda Perputaran Intelijen;<br>- Penyelidikan, Renlid dan Prodlid;<br>- Pengamanan, Renpam dan Prodram<br>- Pengalangan, Rengal dan Prodal.<br>- Operasi Intelijen Yustisial.  |                                      | 6<br>6<br>3           | 3<br>3<br>3 | -<br>6<br>6 | 3<br>3<br>3 | 12<br>18<br>15 | Sda                 |
|      | - Operasi dan Kegiatan            | Pengertian :<br>- Operasi Intelijen<br>- Kegiatan Intelijen<br>- Pola Operasi Intelijen Yustisial   |                                      | 6<br>3                | 3<br>-      | 6<br>12     | 3<br>3      | 18<br>18       |                     |
|      | - Ketentraman dan Keterliban Umum | Penerangan dan Penyuluhan Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat<br>- Pengawasan Mas Media dan Barang Cetakan<br>- Pakem<br>- Cegah dan Penyalahgunaan Agama / Penodaan Agama<br>- Landasan, Jangkauan Strategis, Sasaran Operasi, Bentuk- Bentuk Kegiatan :<br>- Tahap Pendasaran Kegiatan, Tahap Sebelum Sidang, Tahap Selama Sidang sampai dengan Eksekusi.<br>- Mekanisme / Prosedur<br>- Evaluasi |                                      |                       |             |             |             |                |                     |
| IV.  | KAJIAN DASAR TEKNIS PENUNTUTAN    |   |                                      |                       |             |             |             |                |                     |
|      | 1. Pra Penuntutan                 | - Pengertian Pra Penuntutan<br>- Penelitian Berkas Perkara<br>- Teknis membuat petunjuk kelengkapan berkas perkara (dalam praktek)<br>- Teknis pembuatan matrik perkara<br>- Pemeriksaan tambahan.  |                                      | 9                     | 6           | 40          | 3           | 58             | Sda                 |
|      |                                   |   |                                      | 33                    | 18          | 70          | 18          | 139            |                     |
|      |                                   | Jumlah  |                                      |                       |             |             |             |                |                     |

| NO. | MATA DIKLAT                                  | SILABUS/ POKOK BAHASAN   | WIDYAISWARA/PENGAJAR/<br>FASILITATOR | RINCIAN JAM PELAJARAN |           |             |          |            | ASISTEN<br>PENGGAJAR |
|-----|--|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|----------|------------|----------------------|
|     |  |  |                                      | TEORI                 | DISKUSI   | PRAK<br>TEK | UJIAN    | JUM<br>LAH |                      |
| 1   | 2  | 3  | 4                                    | 5                     | 6         | 7           | 8        | 9          | 10                   |
|     | 2. Penuntutan                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian, Syarat dan Bentuk Surat Dakwaan;</li> <li>- Membuat Matrik Surat Dakwaan dan Teknis menyusun Surat Dakwaan;</li> <li>- Pelimpahan Perkara;</li> <li>- Menyusun Pendapat JPU atas Keberatan PH/ Perlawanan;</li> <li>- Pemeriksaan di persidangan;</li> <li>- Penyusunan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dan Replik; Hukum Pembuktian</li> </ul> |                                      | 21                    | 9         | 72          | 3        | 105        | Sda                  |
|     | 3. Upaya Hukum                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Memori dan Kotra Memori Banding;</li> <li>- Penyusunan Memori dan Kontra Memori Kasasi;</li> <li>- Prosedur penyusunan dan pengajuan Kasasi demi kepentingan Hukum oleh Jaksa Agung;</li> <li>- Peninjauan Kembali (PK) oleh Kejaksaan;</li> <li>- Pendapat Jaksa terhadap permohonan Peninjauan Kembali (PK)</li> </ul>                             |                                      | 6                     | 3         | 18          | 3        | 30         | Sda                  |
|     | 4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. pidana badan,</li> <li>2. uang pengganti;</li> <li>3. uang denda dan biaya perkara</li> <li>4. barang Bukti.</li> </ul> </li> </ul>  |                                      | 6                     | 3         | -           | 3        | 12         | Sda                  |
|     | <b>Jumlah</b>                                |  |                                      | <b>33</b>             | <b>15</b> | <b>90</b>   | <b>9</b> | <b>147</b> |                      |

| NO.                                   | MATA DIKLAT   | SILABUS/ POKOK BAHASAN  | WIDYAISWARA/PENGAJAR/<br>FASILITATOR | RINCIAN JAM PELAJARAN |           |             |           |            | ASISTEN<br>PENGAJAR |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|------------|---------------------|
|                                       |   |   |                                      | TEORI                 | DISKUSI   | PRAK<br>TEK | UJIAN     | JUM<br>LAH |                     |
| 1                                     | 2   | 3   | 4                                    | 5                     | 6         | 7           | 8         | 9          | 10                  |
|                                       | 5. Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Umum (Narkotika, Lingkungan Hidup Pembunuhan, Illegal Logging, KDRT, Trafiking, Pengelapapan & Penipuan) | - Teknis Pembuktian Perkara Pidana Umum Penting dan Menarik Perhatian Masyarakat; Teknis Pembuktian Perkara yang Sulit Pembuktiannya.   |                                      | 3                     | 3         | 30          | 3         | 39         | Sda                 |
| <b>V. KAJIAN TINDAK PIDANA KHUSUS</b> |   |   |                                      |                       |           |             |           |            |                     |
|                                       | 1. Tindak Pidana Korupsi  | - Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi, Unsur-unsur dan Modus Operandinya;<br>- Penanganan Tindak Pidana Korupsi (LID, DIK, TUT).<br>- Sistem Pembuktian TP. Korupsi.<br>- Koordinasi dengan Instansi terkait dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.<br>- Pemeriksaan :<br>- Pembuatan BAP<br>- Penyusunan Berkas Perkara Matrik, Chart<br>- Pemaparan<br>- Teknis Pembuktian Perkara Korupsi yang Menarik Perhatian Masyarakat.<br>- Teknis Pembuktian Perkara Korupsi yang sulit pembuktiannya. |                                      | 15                    | 3         | 12          | 3         | 33         | Sda                 |
|                                       | 2. Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Perkara TPK  | - Pemeriksaan :<br>- Pembuatan BAP<br>- Penyusunan Berkas Perkara Matrik, Chart<br>- Pemaparan  |                                      | 9                     | 3         | 12          | 3         | 27         | Sda                 |
|                                       | 3. Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi  | - Teknis Pembuktian Perkara Korupsi yang Menarik Perhatian Masyarakat.<br>- Teknis Pembuktian Perkara Korupsi yang sulit pembuktiannya.   |                                      | 3                     | 3         | 30          | 3         | 39         | Sda                 |
|                                       | 4. Tindak Pidana HAM Berat  | - Perundang-undangan HAM Berat<br>- Penanganan Tindak Pidana HAM Berat<br>- Studi Kasus HAM Berat   | Struktural JAMPIDSUS                 | 6                     | 6         | -           | 3         | 15         | sda                 |
| <b>Jumlah</b>                         |   |   |                                      | <b>36</b>             | <b>18</b> | <b>84</b>   | <b>15</b> | <b>153</b> |                     |

| NO.           | MATA DIKLAT  | SILABUS/ POKOK BAHASAN  | WIDYAISWARA/PENGAJAR/<br>FASILITATOR | RINCIAN JAM PELAJARAN |          |             |          |            | ASISTEN<br>PENGGAJAR |
|---------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------|----------|-------------|----------|------------|----------------------|
|               |  |   |                                      | TEORI                 | DISKUSI  | PRAK<br>TEK | UJIAN    | JUM<br>LAH |                      |
| 1             | 2  | 3   | 4                                    | 5                     | 6        | 7           | 8        | 9          | 10                   |
| VI.           | KAJIAN TUGAS DAN FUNGSI SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA |   |                                      |                       |          |             |          |            |                      |
|               | 1. Hukum Perdata Materijl                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku II (sebagian) dan III KUHPerdata</li> <li>- Sumber Perikatan</li> <li>- Sumber Undang-undang</li> <li>- Sumber Perjanjian</li> <li>- Onrechtmatige daad Ps. 1365, 1367 BW-1372 BW</li> <li>- Wanprestasi</li> </ul>   |                                      | 15                    | 3        | -           | 3        | 21         | Sda                  |
|               | 2. Hukum Acara Perdata                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber Hukum Formal;</li> <li>- Azas-azas Hukum Acara Perdata;</li> <li>- Acara Permohonan;</li> <li>- Acara Gugatan</li> <li>- Pihak-pihak berperkara;</li> <li>- Susun Gugatan dan Jawaban, replik, duplik dan kesimpulan;</li> <li>- Pembuktian;</li> <li>- Penyitaan;</li> <li>- Putusan;</li> <li>- Eksekusi;</li> <li>- Upaya Hukum;</li> <li>- Alternatif Dispute Resolution (ADR)</li> </ul> |                                      | 12                    | 3        | 12          | 3        | 30         |                      |
|               | 3. Studi Kasus Perdata                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedah Kasus Perdata</li> </ul>   |                                      | 3                     | 3        | 21          | 3        | 30         |                      |
| <b>Jumlah</b> |  |   |                                      | <b>30</b>             | <b>9</b> | <b>33</b>   | <b>9</b> | <b>81</b>  |                      |

| NO.           | MATA DIKLAT                       | SILABUS/ POKOK BAHASAN  | WIDYAIKWARA/PENGAJAR/<br>FASILITATOR | RINCIAN JAM PELAJARAN |          |             |          |            | ASISTEN<br>PENGAJAR |
|---------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|----------|-------------|----------|------------|---------------------|
|               |                                   |   |                                      | TEORI                 | DISKUSI  | PRAK<br>TEK | UJIAN    | JUM<br>LAH |                     |
| 1             | 2                                 | 3   | 4                                    | 5                     | 6        | 7           | 8        | 9          | 10                  |
|               | 4. Hukum Acara TUN                | - Subyek dan Obyek Sengketa TUN<br>- Perbuatan Eksepsi Absolute, Relative, dan Eksepsi lain-lain, jawaban duplik dan kesimpulan.  |                                      | 6                     | 3        | -           | 3        | 12         | Sda                 |
|               | 5. Upaya Hukum                    | - Verzet terhadap Verstek<br>- Banding dan Kasasi   |                                      | 3                     | -        | 9           | 3        | 15         | Sda                 |
| VII.          | <b>KAJIAN PENUNJANG KEMAMPUAN</b> |   |                                      |                       |          |             |          |            |                     |
|               | 1. Tindak Pidana Terorisme        | - Perpu No. 1 Jo. UU No. 15 tahun 2003;<br>- Koordinasi dengan Instansi terkait lainnya dalam penanganan Kejahatan Terorisme;<br>- Hambatan, ancaman dan gangguan penanganan perkara TP. Terorisme. |                                      | 6                     | 3        | -           | 3        | 12         | Sda                 |
| <b>Jumlah</b> |                                   |   |                                      | <b>15</b>             | <b>6</b> | <b>9</b>    | <b>9</b> | <b>39</b>  |                     |

| NO. | MATA DIKLAT   | SILABUS/ POKOK BAHASAN   | WIDYAISWARA/PENGAJAR/<br>FASILITATOR | RINCIAN JAM PELAJARAN |         |             |       |            |     | ASISTEN<br>PENGAJAR |
|-----|---|--|--------------------------------------|-----------------------|---------|-------------|-------|------------|-----|---------------------|
|     |   |  |                                      | TEORI                 | DISKUSI | PRAK<br>TEK | UJIAN | JUM<br>LAH |     |                     |
| 1   | 2   | 3  | 4                                    | 5                     | 6       | 7           | 8     | 9          | 10  |                     |
|     | 2. Tindak Pidana Bidang HAKI  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta dan unsur-unsur serta modus operandi T.P di Bidang Hak Cipta;</li> <li>- UU No. 14/2001 tentang Paten dan unsur-unsur serta modus operandi di Bidang Paten;</li> <li>- UU No. 15/2001 tentang Merek dan unsur-unsur serta modus operandi di Bidang Merek;</li> <li>- UU No. 31/2000 tentang Disain Industri dan unsur-unsur serta modus operandi di Bidang Disain Industri;</li> <li>- Yurisprudensi TP. HAKI</li> </ul> |                                      | 6                     | -       | 3           | 3     | 12         | Sda |                     |
|     | 3. Tindak Pidana Kepabeanaan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 17/2006 tentang Perubahan atas UU No. 10/1995 tentang Kepabeanaan;</li> <li>- Perdagangan antar Negara dan modus operandi TP. Kepabeanaan dan Custome Fraud.</li> </ul>  |                                      | 6                     | 3       | -           | 3     | 12         | Sda |                     |
|     | 4. Kedokteran Forensik  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal-pasal KUHP dan KUHP yang berhubungan dengan Visum Et Repertum dan Pemeriksaan medis sebagai suatu alat bukti dalam Tindak Pidana;</li> </ul>  | - FK UI                              | 6                     | 3       | -           | 3     | 12         | Sda |                     |
|     | 5. Undang-undang Pengadialan Anak dan Undang-undang perlindungan anak | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadialan Anak</li> <li>- UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</li> </ul>  |                                      | 9                     | 3       | -           | 3     | 15         | Sda |                     |
|     | <b>Jumlah</b>   |  |                                      | 27                    | 9       | 3           | 12    | 51         |     |                     |

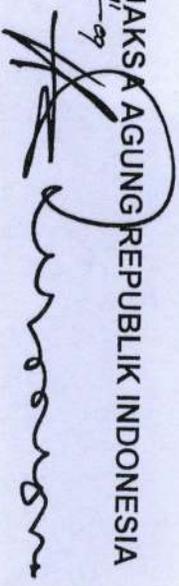
| NO.           | MATA DIKLAT                              | SILABUS/ POKOK BAHASAN   | WIDYAISWARA/PENGAJAR/<br>FASILITATOR | RINCIAN JAM PELAJARAN |           |             |           |            | ASISTEN<br>PENGAJAR |
|---------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|------------|---------------------|
|               |  |  |                                      | TEORI                 | DISKUSI   | PRAK<br>TEK | UJIAN     | JUM<br>LAH |                     |
| 1             | 2  | 3  | 4                                    | 5                     | 6         | 7           | 8         | 9          | 10                  |
| 6.            | Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika | - UU No.5/1997 tentang Psikotropika;<br>- UU No.22/1997 tentang Narkotika.   |                                      | 15                    | 3         | -           | 3         | 21         | Sda                 |
| 7.            | Tindak Pidana Pencucian Uang             | - UU No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang   |                                      | 9                     | 3         | -           | 3         | 15         | Sda                 |
| 8.            | Tindak Pidana Perbankan                  | - UU No.7/1992 Jo. UU No.10/1998 tentang Perbankan   |                                      | 6                     | 3         | -           | 3         | 12         | Sda                 |
| 9.            | Tindak Pidana Perikanan                  | - UU No.31 Tahun 2004 tentang Kelautan dan Perikanan<br>- TP. Kelautan<br>- Illegal Fishing<br>- Peradilan Perikanan |                                      | 6                     | 3         | -           | 3         | 12         | Sda                 |
| 10.           | Tindak Pidana Kehutanan                  | - UU No.41 tahun 1999 ttg Kehutanan;<br>- PP No.34 tahun 2002 tentang Peraturan Pelaksanaan dari UU No.41 Tahun 1999 |                                      | 6                     | 3         | -           | 3         | 12         | Sda                 |
| <b>Jumlah</b> |  |  |                                      | <b>42</b>             | <b>15</b> | <b>-</b>    | <b>15</b> | <b>72</b>  |                     |

| NO.           | MATA DIKLAT                     | SILABUS/ POKOK BAHASAN  | WIDYAISWARA/PENGAJAR/<br>FASILITATOR | RINCIAN JAM PELAJARAN |         |             |       |            | ASISTEN<br>PENGAJAR |
|---------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|---------|-------------|-------|------------|---------------------|
|               |                                 |   |                                      | TEORI                 | DISKUSI | PRAK<br>TEK | UJIAN | JUM<br>LAH |                     |
| 1             | 2                               | 3   | 4                                    | 5                     | 6       | 7           | 8     | 9          | 10                  |
| 11.           | Lingkungan Hidup                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>- Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang Lingkungan Hidup.</li> <li>- UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;</li> <li>- Kejahatan dan Pelanggaran dalam Rumah Tangga.</li> </ul>  | Struktural JAM PIDUM                 | 6                     | -       | 3           | 3     | 12         | Sda                 |
| 12.           | Kekerasan Dalam Rumah Tangga    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;</li> <li>- Kejahatan dan Pelanggaran dalam Rumah Tangga.</li> </ul>  |                                      | 6                     | -       | 3           | 3     | 12         | Sda                 |
| 13.           | Trafiking                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perundang-undangan Trafiking</li> <li>- Penanganan Tindak Pidana Trafiking</li> <li>- Studi Kasus Trafiking</li> </ul>   | Struktural JAMPIDUM                  | 3                     | 3       | 3           | 3     | 12         | sda.                |
| 14.           | Kapita Selekta Hukum Pertanahan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria</li> <li>- Definisi Fungsi Serta Arti Hukum Agraria</li> <li>- Azas-azas Hukum Agraria</li> <li>- Hak Atas Tanah</li> <li>- Penyelundupan Hukum</li> <li>- Konversi</li> <li>- Pendaftaran Tanah</li> <li>- Prosedur Memperoleh Hak Tanah</li> <li>- Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</li> </ul> |                                      | 6                     | 3       | -           | 3     | 12         | sda.                |
| <b>Jumlah</b> |                                 |   |                                      | 21                    | 6       | 9           | 12    | 48         |                     |

VIII. KETERAMPILAN PENDUKUNG

| NO.           | MATA DIKLAT   | SILABUS/ POKOK BAHASAN   | WIDYAISWARA/PENGAJAR/<br>FASILITATOR         | RINCIAN JAM PELAJARAN |         |             |       |            | ASISTEN<br>PENGAJAR |
|---------------|---|--|--|-----------------------|---------|-------------|-------|------------|---------------------|
|               |   |  |  | TEORI                 | DISKUSI | PRAK<br>TEK | UJIAN | JUM<br>LAH |                     |
| 1             | 2   | 3  | 4  | 5                     | 6       | 7           | 8     | 9          | 10                  |
|               | 15. Bahasa Asing  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legal Terminology;</li> <li>- Teknik membaca kontrak dalam bahasa Inggris;</li> <li>- Teknik Presentasi/ pemaparan dalam Bahasa Inggris</li> </ul>                      | Tim Angraini, S.S.,MM.                       | 12                    | -       | 9           | 3     | 24         |                     |
|               | 16. Komputer dan Internet   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik Operasional Computer dengan Microsoft Word dan Power Point</li> <li>- Teknik Presentasi dengan menggunakan system Power Point</li> <li>- E Government</li> </ul> | - LPIA, Sciencom                             | 3                     | 3       | 18          | 3     | 27         |                     |
| <b>Jumlah</b> |   |  |  | 15                    | 3       | 27          | 6     | 51         |                     |
| IX.           | APLIKASI  |  |  |                       |         |             |       |            |                     |
|               | 1. Praktek Kerja Lapangan (PKL)                                       | Observasi Lapangan dengan mengunjungi Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Keajaasaan Tinggi yang telah ditentukan.  | - Tim Widyaaiswara dan Tim Penyelenggara PKL | -                     | -       | 70          | -     | 70         | Sda                 |
|               | 2. Praktek Simulasi Persidangan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara | Persidangan Semu dengan mengundang Hakim dan Penasehat Hukum Jaksa Pengacara Negara  | - Tim Widyaaiswara dan Tim Penyelenggara     | -                     | -       | 18          | -     | 18         | Sda                 |
|               | 3. Praktek Simulasi Persidangan Perkara Pidana                        | Persidangan Semu dengan mengundang Hakim dan Penasehat Hukum dari LBH/LKBH dan Penyidik Poli   | - Tim Widyaaiswara dan Tim Penyelenggara     | -                     | -       | 54          | -     | 54         | Sda                 |

|                |  |  |  |     |     |     |     |      |  |
|----------------|--|--|--|-----|-----|-----|-----|------|--|
| 4.             | Gladi Kotor, Gladi Bersih Upacara Pembukaan                      |  | -Kapusdiklat, Kabid DTF, dan Penyelenggara.                        | -   | -   | 6   | -   | 6    |  |
| 5.             | Gladi Kotor, Gladi Bersih Upacara Penutupan dan Pelantikan Jaksa |  | - Kapusdiklat, Kabid DTF, dan Penyelenggara                        | -   | -   | 9   | -   | 9    |  |
| 6.             | Penulisan Kertas Kerja Tugas Jaksa Tingkat Dasar                 | Pembuatan Kertas Kerja atas Observasi Lapangan yang dilaksanakan. Tugas diseminarkan | - Tim Penguji  | 3   | 3   | -   | 34  | 40   | Ket. Setiap peserta alokasi waktu 30 menit (untuk ujian) |
| 7.             | Evaluasi kelulusan   |  | - Kapusdiklat, Para Kabid, Widyaaiswara/Pengajar dan Penyelenggara | -   | 18  | -   | -   | 18   |  |
| Jumlah         |  |  |  | 3   | 21  | 157 | 34  | 215  |  |
| JUMLAH TOTAL : |  |  |  | 291 | 180 | 527 | 148 | 1146 |  |

  
 2011-09-11  
 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI

## PERBANDINGAN

### JAM PELAJARAN DIKLAT PPPJ TEORI DENGAN PRAKTEK

TEORI : 291 JPPL = 25,39 %

PRAKTEK : 855 JPPL = 76,61 %

---

1146 JPPL = 100 %